

Deepfake, Disinformasi, dan Krisis Kepercayaan Publik

Analisis Teknologi, Demokrasi, Tata Kelola, dan Ketahanan Informasi

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudyct.com/cv.pdf

IBM - ASMI

2026

DEEFAKE, DISINFORMASI, DAN KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK

Ketika Kebenaran Semakin Sulit Dibedakan

*"Di era digital,
yang paling langka
bukan lagi informasi,
tetapi kebenaran."*

ANCAMAN UTAMA



Deepfake
(Manipulasi audio, gambar dan video dengan AI)



Disinformasi
(Informasi palsu yang sengaja disebarkan)



Misinformasi
(Informasi salah tanpa niat jahat)



Echo chamber dan polarisasi di media sosial



Automasi penyebaran hoaks melalui bot dan algoritma

DAMPAK STRATEGIS



Erosi kepercayaan pada institusi demokrasi



Polarisasi sosial dan konflik identitas



Krisis kredibilitas media dan jurnalisme



Kerugian ekonomi dan reputasi publik



Ancaman keamanan nasional dan stabilitas politik

STRATEGI MENGHADAPI DEEFAKE DAN DISINFORMASI



Literasi Digital & Literasi Media

Membangun kemampuan berpikir kritis masyarakat



Fact-Checking & Verifikasi

Budaya cek fakta sebelum percaya dan membagikan



Teknologi Deteksi Berbasis AI

Watermark, metadata dan sistem autentikasi konten



Regulasi & Tata Kelola

Perlindungan data, transparansi platform dan penegakan hukum



Kolaborasi Multi Pihak

Pemerintah, akademisi, media, industri dan masyarakat sipil



Etika Digital

Mengutamakan kebenaran, integritas dan tanggung jawab bersama

PESAN UTAMA

- ✓ Kebenaran adalah fondasi demokrasi.
- ✓ Literasi digital menjadi kompetensi esensial abad ke-21.
- ✓ Teknologi harus dikendalikan untuk melayani kemanusiaan.
- ✓ Kepercayaan publik harus dijaga sebagai aset bersama.
- ✓ Kita semua bertanggung jawab melawan disinformasi.

"Kita tidak bisa menghentikan teknologi, tetapi kita bisa mengelola dan mengarahkannya untuk kebaikan bersama."



Oleh:
**Prof Ir Rudy C
Tarumingkeng, PhD**

www.rudyct.com/cv.pdf

IBM - ASMI

Indonesian Business and
Management Institute
Akademi Manajemen Indonesia

IBM-ASMI INSTITUT BISNIS
DAN MULTIMEDIA

DEEFAKE, DISINFORMASI, DAN KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK

FAKTA
ATAU
REKAYASA?

Memahami Ancaman • Membangun Ketahanan • Menjaga Demokrasi

Teknologi deepfake dan penyebaran disinformasi mengubah cara kita memandang kebenaran. Akibatnya, **kepercayaan publik** terhadap informasi, institusi, dan satu sama lain berada di titik kritis.

INFORMASI
MENYESATKAN

HOAX • FITNAH • PROPAGANDA

DEEFAKE

DAMPAK NYATA



ANCAMAN DEMOKRASI

Manipulasi opini publik, polarisasi, dan pelemahan proses pemilu.



KETIDAKPERCAYAAN MASSAL

Publik meragukan media, lembaga, ahli, hingga sesama warga.



RISIKO KEAMANAN & EKONOMI

Penipuan, pemerasan, kerugian finansial, dan gangguan reputasi.



DARURAT INFORMASI KESEHATAN

Disinformasi medis membahayakan keputusan dan keselamatan.

MEMBANGUN KETAHANAN PUBLIK



Literasi Media & Informasi

Kemampuan berpikir kritis, memverifikasi, dan memahami konteks.



Teknologi Deteksi & Verifikasi

AI for good, watermarking, dan autentikasi konten.



Etika, Regulasi & Akuntabilitas

Aturan yang seimbang antara inovasi, privasi, dan hak publik.



Kolaborasi Multi-Pihak

Pemerintah, platform digital, media, akademisi, dan masyarakat sipil.

APA YANG BISA KITA LAKUKAN?



LIHAT DENGAN KRITIS

Jangan mudah percaya sebelum memeriksa.



CEK SUMBER INFORMASI

Pastikan sumber terpercaya dan bukan hoaks.



JANGAN SEBAR SEMBARANG

Verifikasi dulu sebelum berbagi informasi.



LAPORKAN KONTEN MERAGUKAN

Bantu platform dan otoritas memerangi disinformasi.



TINGKATKAN LITERASI DIGITAL

Terus belajar, terus bertanya, terus waspada.

“ Di era deepfake dan disinformasi, kepercayaan publik adalah fondasi paling berharga bagi masa depan bangsa. ”

Oleh:

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudyc.com/cv.pdf

IBM-ASMI

INSTITUT BISNIS DAN MULTIMEDIA



KEBENARAN
Fondasi
Peradaban



INTEGRITAS
Komitmen pada
Fakta & Etika



INOVASI
Teknologi untuk
Kebaikan



KOLABORASI
Bersatu Melawan
Disinformasi



KEPERCAYAAN
Modal Sosial untuk
Masa Depan

Abstrak

Perkembangan kecerdasan artifisial generatif telah memperluas kemampuan manusia untuk membuat gambar, suara, dan video sintetis yang sangat realistis. Deepfake dapat digunakan secara produktif dalam pendidikan, industri kreatif, dan aksesibilitas, tetapi juga membuka ruang baru bagi penipuan, kekerasan berbasis gender, manipulasi politik, rekayasa sosial, serta serangan terhadap reputasi dan institusi. Artikel ini membahas deepfake sebagai persoalan teknologi sekaligus persoalan tata kelola, psikologi, ekonomi politik media, demokrasi, manajemen risiko, dan kepercayaan publik. Argumen utama artikel adalah bahwa bahaya deepfake tidak hanya terletak pada kemampuan membuat orang mempercayai sesuatu yang palsu. Bahaya yang lebih mendalam ialah kemampuan menciptakan keraguan umum terhadap semua bukti digital, termasuk bukti yang autentik. Fenomena ini melahirkan liar's dividend, yaitu peluang bagi pelaku untuk menyangkal bukti nyata dengan menyebutnya rekayasa. Artikel mengkaji mekanisme produksi dan distribusi deepfake, bias kognitif, ekonomi perhatian, dampak terhadap pemilu, kesehatan, dunia usaha, jurnalisme, dan komunikasi pemerintah. Dibahas pula keterbatasan deteksi teknis, peran provenance dan watermarking, efektivitas label serta fact-checking, tanggung jawab platform, kebebasan berekspresi, dan perkembangan tata kelola AI di Indonesia. Pada bagian akhir ditawarkan kerangka manajemen risiko dan peta jalan Indonesia 2026–2035 yang menekankan pendekatan whole-of-society, perlindungan korban, integritas pemilu, literasi media, autentikasi komunikasi, audit platform, dukungan riset, dan pembangunan institusi yang dapat dipercaya. Kesimpulannya, ketahanan terhadap deepfake hanya dapat dibangun melalui kombinasi teknologi, pendidikan, proses organisasi, hukum yang proporsional, dan budaya akuntabilitas.

Kata Kunci: deepfake; disinformasi; misinformasi; kepercayaan publik; media sintetis; kecerdasan artifisial; demokrasi; literasi digital; integritas informasi; tata kelola platform.

Daftar Isi

Pendahuluan: Ketika Melihat dan Mendengar Tidak Lagi Cukup

1. Memahami Deepfake sebagai Teknologi Sintesis Media
2. Dari Misinformasi menuju Disinformasi Terindustrialisasi
3. Ekonomi Politik Perhatian dan Insentif Penyebaran
4. Krisis Epistemik dan Runtuhnya Rujukan Bersama
5. Psikologi Kepercayaan, Emosi, dan Bias Kognitif
6. Liar's Dividend: Ketika Pelaku Menolak Bukti yang Asli
7. Pemilu, Demokrasi, dan Manipulasi Politik
8. Konteks Indonesia: Polarisasi, Pemilu, dan Ruang Digital
9. Penipuan Finansial dan Rekayasa Sosial
10. Kekerasan Berbasis Gender dan Deepfake Intim
11. Jurnalisme, Verifikasi, dan Beban Baru Redaksi
12. Komunikasi Pemerintah dan Manajemen Krisis

13. Dunia Usaha, Reputasi, dan Tata Kelola Korporasi
14. Kesehatan Publik dan Informasi Ilmiah
15. Pendidikan, Anak, dan Literasi Media Baru
16. Deteksi Teknis: Kemajuan dan Keterbatasan
17. Provenance, Watermarking, dan Autentikasi Konten
18. Label, Fact-checking, dan Prebunking
19. Tata Kelola Platform dan Akuntabilitas Algoritma
20. Hukum, Hak Asasi, dan Kebebasan Berekspresi
21. Perkembangan Tata Kelola AI di Indonesia
22. Pendekatan Whole-of-Society untuk Integritas Informasi
23. Membangun Kembali Kepercayaan Publik
24. Kerangka Manajemen Risiko Deepfake bagi Organisasi
25. Agenda Kebijakan dan Peta Jalan Indonesia 2026–2035

Penutup: Menjaga Kepercayaan di Tengah Media Sintetis

Kerangka Manajemen Risiko Deepfake

Glossarium

Daftar Pustaka

Pendahuluan: Ketika Melihat dan Mendengar Tidak Lagi Cukup

Deepfake mengubah salah satu fondasi dasar kehidupan sosial: keyakinan bahwa rekaman suara, foto, dan video memiliki hubungan yang relatif kuat dengan peristiwa nyata. Teknologi generatif kini memungkinkan orang membuat representasi yang sangat meyakinkan tentang seseorang yang seolah-olah berkata atau melakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Persoalannya tidak berhenti pada pemalsuan isi. Ketika masyarakat mengetahui bahwa semua bukti digital dapat dipalsukan, muncul keraguan terhadap bukti autentik. Dengan demikian, deepfake menimbulkan dua risiko sekaligus: risiko mempercayai kebohongan dan risiko menolak kebenaran.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintetis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala penyebaran. Dalam konteks pendahuluan: ketika melihat dan mendengar tidak lagi cukup, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema pendahuluan: ketika melihat dan mendengar tidak lagi cukup menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber tepercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks pendahuluan: ketika melihat dan mendengar tidak lagi cukup, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema pendahuluan: ketika melihat dan mendengar tidak lagi cukup menuntut keseimbangan antara

pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks pendahuluan: ketika melihat dan mendengar tidak lagi cukup, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan pendahuluan: ketika melihat dan mendengar tidak lagi cukup. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penghapusan konten, tetapi juga dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu, pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran “cari sendiri di internet”.

1. Memahami Deepfake sebagai Teknologi Sintesis Media

Deepfake adalah media sintesis yang dibuat atau dimodifikasi menggunakan kecerdasan artifisial, terutama pembelajaran mendalam, untuk menghasilkan wajah, suara, gerak, atau adegan yang tampak realistis. Istilah ini sering dikaitkan dengan pertukaran wajah, tetapi cakupannya lebih luas, termasuk kloning suara, lip-sync, avatar sintesis, dan video yang sepenuhnya dihasilkan oleh model generatif.

Teknologi tersebut memiliki penggunaan sah dalam film, pendidikan, aksesibilitas, dan kreativitas, tetapi dapat disalahgunakan untuk penipuan, intimidasi, manipulasi politik, dan penghancuran reputasi.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintetis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala penyebaran. Dalam konteks 1. memahami deepfake sebagai teknologi sintesis media, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema 1. memahami deepfake sebagai teknologi sintesis media menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber tepercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks 1. memahami deepfake sebagai teknologi sintesis media, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema 1. memahami deepfake sebagai teknologi sintesis media menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks 1. memahami deepfake sebagai teknologi sintesis media, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan 1. memahami deepfake sebagai teknologi sintesis media. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penghapusan konten, tetapi juga dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu, pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran “cari sendiri di internet”.

2. Dari Misinformasi menuju Disinformasi Terindustrialisasi

Misinformasi adalah informasi salah yang disebarkan tanpa niat menipu, sedangkan disinformasi adalah informasi salah atau menyesatkan yang diproduksi dan disebarkan secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Deepfake memperbesar kapasitas disinformasi karena biaya produksi menurun, kualitas meningkat, dan distribusi dapat dilakukan dalam skala besar. Aktor yang dahulu memerlukan studio, aktor, dan kemampuan penyuntingan profesional kini dapat menghasilkan konten persuasif melalui perangkat lunak yang semakin mudah digunakan.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintesis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala

penyebaran. Dalam konteks 2. dari misinformasi menuju disinformasi terindustrialisasi, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema 2. dari misinformasi menuju disinformasi terindustrialisasi menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber tepercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks 2. dari misinformasi menuju disinformasi terindustrialisasi, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema 2. dari misinformasi menuju disinformasi terindustrialisasi menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks 2. dari misinformasi menuju disinformasi terindustrialisasi, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian,

solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan 2. dari misinformasi menuju disinformasi terindustrialisasi. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penghapusan konten, tetapi juga dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu, pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran “cari sendiri di internet”.

3. Ekonomi Politik Perhatian dan Insentif Penyebaran

Disinformasi berkembang dalam ekosistem ekonomi perhatian. Platform memperoleh nilai dari keterlibatan pengguna, sedangkan konten yang mengejutkan, emosional, atau memicu kemarahan cenderung menarik klik dan dibagikan. Deepfake cocok dengan logika ini karena memiliki unsur kebaruan, kejutan, dan kedekatan psikologis. Masalahnya bukan semata-mata pengguna yang kurang kritis, tetapi struktur insentif yang menghargai kecepatan dan viralitas lebih tinggi daripada ketelitian dan verifikasi.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintesis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala penyebaran. Dalam konteks 3. ekonomi politik perhatian dan insentif penyebaran, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema 3. ekonomi politik perhatian dan insentif penyebaran menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber tepercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks 3. ekonomi politik perhatian dan insentif penyebaran, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema 3. ekonomi politik perhatian dan insentif penyebaran menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks 3. ekonomi politik perhatian dan insentif penyebaran, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan 3. ekonomi politik perhatian dan insentif penyebaran. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai

bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penghapusan konten, tetapi juga dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu, pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran “cari sendiri di internet”.

4. Krisis Epistemik dan Runtuhnya Rujukan Bersama

Masyarakat demokratis memerlukan sejumlah fakta bersama agar perdebatan dapat berlangsung. Perbedaan nilai dan kepentingan adalah wajar, tetapi diskusi menjadi mustahil apabila setiap pihak memiliki realitasnya sendiri. Deepfake memperdalam krisis epistemik karena bukti audiovisual tidak lagi otomatis menjadi titik rujuk. Ketika setiap video dapat dituduh palsu dan setiap penyangkalan dapat dicurigai sebagai manipulasi, ruang publik kehilangan mekanisme dasar untuk menyelesaikan perselisihan faktual.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintesis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala penyebaran. Dalam konteks 4. krisis epistemik dan runtuhnya rujukan bersama, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema 4. krisis epistemik dan runtuhnya rujukan bersama menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap

semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber tepercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks 4. krisis epistemik dan runtuhnya rujukan bersama, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema 4. krisis epistemik dan runtuhnya rujukan bersama menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks 4. krisis epistemik dan runtuhnya rujukan bersama, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan 4. krisis epistemik dan runtuhnya rujukan bersama. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penghapusan konten, tetapi juga dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu, pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran “cari sendiri di internet”.

5. Psikologi Kepercayaan, Emosi, dan Bias Kognitif

Orang tidak menilai informasi secara murni rasional. Mereka menggunakan identitas kelompok, pengalaman sebelumnya, emosi, kredibilitas sumber, dan kesesuaian dengan keyakinan awal. Deepfake yang memperkuat prasangka atau ketakutan lebih mudah diterima, terutama ketika dilihat berulang kali. Efek kebenaran ilusi, bias konfirmasi, dan penalaran termotivasi membuat koreksi sering datang terlambat atau tidak sepenuhnya menghapus kesan awal.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintetis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala penyebaran. Dalam konteks 5. psikologi kepercayaan, emosi, dan bias kognitif, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema 5. psikologi kepercayaan, emosi, dan bias kognitif menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber tepercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks 5. psikologi kepercayaan, emosi, dan bias kognitif, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial

Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema 5. psikologi kepercayaan, emosi, dan bias kognitif menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks 5. psikologi kepercayaan, emosi, dan bias kognitif, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan 5. psikologi kepercayaan, emosi, dan bias kognitif. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penghapusan konten, tetapi juga dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu, pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran “cari sendiri di internet”.

6. Liar's Dividend: Ketika Pelaku Menolak Bukti yang Asli

Salah satu konsekuensi penting keberadaan deepfake adalah liar's dividend, yaitu keuntungan bagi pelaku kesalahan untuk menolak bukti autentik dengan menyebutnya hasil manipulasi. Semakin masyarakat sadar akan kemampuan pemalsuan, semakin masuk akal penyangkalan tersebut terdengar. Akibatnya, deepfake tidak harus benar-benar diproduksi untuk merusak akuntabilitas; cukup dengan menciptakan suasana keraguan yang memungkinkan bukti nyata diperdebatkan tanpa akhir.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintetis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala penyebaran. Dalam konteks 6. liar's dividend: ketika pelaku menolak bukti yang asli, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema 6. liar's dividend: ketika pelaku menolak bukti yang asli menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber tepercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks 6. liar's dividend: ketika pelaku menolak bukti yang asli, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema 6. liar's dividend: ketika pelaku menolak bukti yang asli menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu

tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks 6. liar's dividend: ketika pelaku menolak bukti yang asli, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan 6. liar's dividend: ketika pelaku menolak bukti yang asli. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penghapusan konten, tetapi juga dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu, pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran "cari sendiri di internet".

7. Pemilu, Demokrasi, dan Manipulasi Politik

Dalam pemilu, deepfake dapat digunakan untuk mendiskreditkan kandidat, menekan partisipasi, menyebarkan instruksi palsu, memprovokasi konflik, atau menciptakan kesan dukungan tokoh tertentu. Efeknya tidak selalu berupa perubahan pilihan politik secara langsung. Konten palsu juga dapat mengubah agenda pemberitaan, mengalihkan sumber daya kampanye, memicu kebingungan, dan mengurangi kepercayaan terhadap proses pemilu. Karena pemilu berlangsung dalam waktu terbatas, koreksi yang datang setelah pemungutan suara mungkin tidak lagi efektif.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintetis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala penyebaran. Dalam konteks 7. pemilu, demokrasi, dan manipulasi politik, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema 7. pemilu, demokrasi, dan manipulasi politik menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber tepercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks 7. pemilu, demokrasi, dan manipulasi politik, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema 7. pemilu, demokrasi, dan manipulasi politik menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks 7. pemilu, demokrasi, dan manipulasi politik, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik

harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan 7. pemilu, demokrasi, dan manipulasi politik. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penghapusan konten, tetapi juga dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu, pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran “cari sendiri di internet”.

8. Konteks Indonesia: Polarisasi, Pemilu, dan Ruang Digital

Indonesia memiliki populasi digital besar, keragaman sosial tinggi, dan ekosistem media yang sangat aktif. Kondisi ini menciptakan peluang partisipasi sekaligus kerentanan terhadap manipulasi. Pada Pemilu 2024, perhatian terhadap penggunaan AI dan deepfake meningkat, termasuk manipulasi video dalam kampanye. Tantangan Indonesia diperberat oleh kesenjangan literasi digital, kecepatan penyebaran melalui aplikasi percakapan, serta kuatnya jaringan sosial berbasis keluarga, agama, komunitas, dan daerah.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintetis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala penyebaran. Dalam konteks 8. konteks indonesia: polarisasi, pemilu, dan ruang digital, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan

distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema 8. konteks indonesia: polarisasi, pemilu, dan ruang digital menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber tepercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks 8. konteks indonesia: polarisasi, pemilu, dan ruang digital, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema 8. konteks indonesia: polarisasi, pemilu, dan ruang digital menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks 8. konteks indonesia: polarisasi, pemilu, dan ruang digital, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan 8. konteks indonesia: polarisasi, pemilu, dan ruang digital. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi

percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penghapusan konten, tetapi juga dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu, pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran “cari sendiri di internet”.

9. Penipuan Finansial dan Rekayasa Sosial

Deepfake suara dan video dapat digunakan untuk meniru pimpinan perusahaan, pejabat, anggota keluarga, atau figur publik. Pelaku dapat meminta transfer dana, kode autentikasi, atau informasi rahasia dengan memanfaatkan rasa urgensi. Serangan menjadi lebih meyakinkan karena korban tidak hanya menerima pesan teks, tetapi mendengar suara atau melihat wajah yang dikenalnya. Dengan demikian, keamanan siber tidak lagi cukup berfokus pada kata sandi dan perangkat; organisasi perlu memverifikasi identitas dan konteks komunikasi.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintesis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala penyebaran. Dalam konteks 9. penipuan finansial dan rekayasa sosial, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema 9. penipuan finansial dan rekayasa sosial menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka.

Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber tepercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks 9. penipuan finansial dan rekayasa sosial, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema 9. penipuan finansial dan rekayasa sosial menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks 9. penipuan finansial dan rekayasa sosial, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan 9. penipuan finansial dan rekayasa sosial. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penghapusan konten, tetapi juga

dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu, pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran “cari sendiri di internet”.

10. Kekerasan Berbasis Gender dan Deepfake Intim

Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling merusak adalah pembuatan gambar atau video intim tanpa persetujuan. Korban, terutama perempuan dan anak, dapat mengalami stigma, pemerasan, tekanan psikologis, kehilangan pekerjaan, dan kerusakan relasi sosial. Kerugian tetap nyata meskipun konten tersebut palsu. Respons kebijakan harus berpusat pada korban, mempercepat penghapusan konten, melindungi identitas, dan menyediakan jalur hukum serta pemulihan psikososial.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintetis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala penyebaran. Dalam konteks 10. kekerasan berbasis gender dan deepfake intim, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema 10. kekerasan berbasis gender dan deepfake intim menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber tepercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks 10. kekerasan berbasis gender dan deepfake intim, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang

baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema 10. kekerasan berbasis gender dan deepfake intim menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks 10. kekerasan berbasis gender dan deepfake intim, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan 10. kekerasan berbasis gender dan deepfake intim. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penghapusan konten, tetapi juga dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu,

pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran “cari sendiri di internet”.

11. Jurnalisme, Verifikasi, dan Beban Baru Redaksi

Redaksi menghadapi tekanan untuk bergerak cepat sekaligus memverifikasi materi yang semakin kompleks. Pemeriksaan metadata, sumber pertama, konteks lokasi, sinkronisasi audio-visual, dan jejak distribusi memerlukan keterampilan serta alat khusus. Namun teknologi deteksi tidak selalu memberikan kepastian. Jurnalisme perlu memperkuat prosedur autentikasi, transparansi koreksi, kerja sama lintas redaksi, dan komunikasi yang menjelaskan tingkat keyakinan tanpa menimbulkan kepanikan.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintetis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala penyebaran. Dalam konteks 11. jurnalisme, verifikasi, dan beban baru redaksi, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema 11. jurnalisme, verifikasi, dan beban baru redaksi menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber tepercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks 11. jurnalisme, verifikasi, dan beban baru redaksi, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema 11. jurnalisme, verifikasi, dan beban baru redaksi menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko,

perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks 11. jurnalisme, verifikasi, dan beban baru redaksi, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan 11. jurnalisme, verifikasi, dan beban baru redaksi. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penghapusan konten, tetapi juga dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu, pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran “cari sendiri di internet”.

12. Komunikasi Pemerintah dan Manajemen Krisis

Dalam situasi bencana, konflik, wabah, atau ketegangan sosial, deepfake dapat menyebarkan perintah palsu, pengumuman bohong, dan rekaman pejabat yang direkayasa. Pemerintah memerlukan kanal resmi yang konsisten, protokol autentikasi pesan, juru bicara yang dipercaya, serta kemampuan respons cepat.

Kecepatan penting, tetapi kredibilitas jangka panjang lebih penting. Pemerintah yang sering tidak transparan akan kesulitan meminta publik mempercayai klarifikasi ketika krisis terjadi.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintetis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala penyebaran. Dalam konteks 12. komunikasi pemerintah dan manajemen krisis, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema 12. komunikasi pemerintah dan manajemen krisis menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber tepercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks 12. komunikasi pemerintah dan manajemen krisis, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema 12. komunikasi pemerintah dan manajemen krisis menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan

sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks 12. komunikasi pemerintah dan manajemen krisis, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan 12. komunikasi pemerintah dan manajemen krisis. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penghapusan konten, tetapi juga dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu, pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran “cari sendiri di internet”.

13. Dunia Usaha, Reputasi, dan Tata Kelola Korporasi

Perusahaan dapat menjadi sasaran deepfake yang menampilkan direksi mengumumkan akuisisi palsu, perubahan harga, kebangkrutan, atau pernyataan kontroversial. Konten semacam itu dapat memengaruhi harga saham, hubungan pelanggan, dan moral karyawan. Manajemen risiko harus memasukkan skenario media sintetis, pemantauan reputasi, protokol persetujuan komunikasi, autentikasi rapat daring, dan latihan respons insiden.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintetis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala penyebaran. Dalam konteks 13. dunia usaha, reputasi, dan tata kelola korporasi, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko

yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema 13. dunia usaha, reputasi, dan tata kelola korporasi menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber tepercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks 13. dunia usaha, reputasi, dan tata kelola korporasi, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema 13. dunia usaha, reputasi, dan tata kelola korporasi menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks 13. dunia usaha, reputasi, dan tata kelola korporasi, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan 13. dunia usaha, reputasi, dan tata kelola korporasi. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penghapusan konten, tetapi juga dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu, pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran “cari sendiri di internet”.

14. Kesehatan Publik dan Informasi Ilmiah

Disinformasi kesehatan dapat mengurangi kepatuhan terhadap vaksinasi, pengobatan, atau pedoman keselamatan. Deepfake dokter, ilmuwan, atau pejabat kesehatan dapat memberi legitimasi palsu kepada klaim berbahaya. Namun respons tidak boleh berasumsi bahwa semua keraguan publik berasal dari kebodohan. Kepercayaan kesehatan dibangun melalui konsistensi, empati, keterbukaan terhadap ketidakpastian, dan hubungan jangka panjang dengan komunitas.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintesis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala penyebaran. Dalam konteks 14. kesehatan publik dan informasi ilmiah, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema 14. kesehatan publik dan informasi ilmiah menuntut

keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber tepercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks 14. kesehatan publik dan informasi ilmiah, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema 14. kesehatan publik dan informasi ilmiah menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks 14. kesehatan publik dan informasi ilmiah, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan 14. kesehatan publik dan informasi ilmiah. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus

hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penghapusan konten, tetapi juga dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu, pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran “cari sendiri di internet”.

15. Pendidikan, Anak, dan Literasi Media Baru

Pendidikan literasi media harus bergerak melampaui pesan sederhana “jangan percaya internet”. Skeptisisme tanpa arah justru dapat memperdalam sinisme. Peserta didik perlu belajar memeriksa sumber, memahami tujuan komunikator, membandingkan bukti, menggunakan pencarian lateral, mengenali manipulasi emosional, dan mengetahui kapan harus menunda berbagi. Literasi juga harus mencakup pemahaman dasar mengenai cara kerja AI generatif dan keterbatasan alat deteksi.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintetis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala penyebaran. Dalam konteks 15. pendidikan, anak, dan literasi media baru, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema 15. pendidikan, anak, dan literasi media baru menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber tepercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks 15. pendidikan, anak, dan literasi media baru, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat

dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema 15. pendidikan, anak, dan literasi media baru menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks 15. pendidikan, anak, dan literasi media baru, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan 15. pendidikan, anak, dan literasi media baru. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penghapusan konten, tetapi juga dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu,

pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran “cari sendiri di internet”.

16. Deteksi Teknis: Kemajuan dan Keterbatasan

Peneliti mengembangkan detektor berdasarkan artefak visual, pola frekuensi, ketidakkonsistenan pencahayaan, gerak wajah, karakteristik suara, dan jejak model generatif. Akan tetapi, deteksi merupakan perlombaan dinamis. Ketika detektor menemukan pola tertentu, generator dapat diperbaiki untuk menghilangkannya. Kinerja laboratorium juga dapat menurun ketika menghadapi kompresi, rekaman ulang, format baru, atau model yang belum pernah dilihat.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintetis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala penyebaran. Dalam konteks 16. deteksi teknis: kemajuan dan keterbatasan, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema 16. deteksi teknis: kemajuan dan keterbatasan menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber tepercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks 16. deteksi teknis: kemajuan dan keterbatasan, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema 16. deteksi teknis: kemajuan dan keterbatasan menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak,

dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks 16. deteksi teknis: kemajuan dan keterbatasan, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan 16. deteksi teknis: kemajuan dan keterbatasan. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penghapusan konten, tetapi juga dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu, pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran “cari sendiri di internet”.

17. Provenance, Watermarking, dan Autentikasi Konten

Pendekatan lain adalah membuktikan asal-usul konten melalui metadata kriptografis, tanda tangan perangkat, dan catatan perubahan. Provenance tidak selalu menentukan apakah isi benar, tetapi membantu menjawab siapa yang membuat, dengan perangkat apa, dan apakah file telah dimodifikasi. Watermarking dapat memberi sinyal bahwa konten dihasilkan AI, meskipun tanda tersebut dapat rusak, dihapus, atau tidak diterapkan oleh semua penyedia.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintetis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala penyebaran. Dalam konteks 17. provenance, watermarking, dan autentikasi konten, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema 17. provenance, watermarking, dan autentikasi konten menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber tepercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks 17. provenance, watermarking, dan autentikasi konten, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema 17. provenance, watermarking, dan autentikasi konten menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks 17. provenance, watermarking, dan autentikasi konten, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan

yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan 17. provenance, watermarking, dan autentikasi konten. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penghapusan konten, tetapi juga dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu, pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran “cari sendiri di internet”.

18. Label, Fact-checking, dan Prebunking

Label peringatan dan pemeriksaan fakta dapat mengurangi kepercayaan serta niat berbagi konten palsu. Namun desain intervensi harus hati-hati karena peringatan yang terlalu umum dapat meningkatkan kecurigaan terhadap semua informasi. Prebunking atau inokulasi informasi berusaha menjelaskan teknik manipulasi sebelum orang terpapar, sehingga mereka lebih siap mengenali pola penipuan tanpa menjadi sinis terhadap keseluruhan ekosistem informasi.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintetis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala penyebaran. Dalam konteks 18. label, fact-checking, dan prebunking, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital.

Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema 18. label, fact-checking, dan prebunking menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber tepercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks 18. label, fact-checking, dan prebunking, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema 18. label, fact-checking, dan prebunking menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks 18. label, fact-checking, dan prebunking, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan 18. label, fact-checking, dan prebunking. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan

yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penghapusan konten, tetapi juga dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu, pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran “cari sendiri di internet”.

19. Tata Kelola Platform dan Akuntabilitas Algoritma

Platform menentukan seberapa cepat deepfake menyebar, siapa yang melihatnya, dan apakah pembuatnya memperoleh uang. Karena itu, tanggung jawab platform tidak dapat dibatasi pada penghapusan setelah viral. Tata kelola perlu mencakup penilaian risiko, pembatasan monetisasi, transparansi rekomendasi, akses peneliti, mekanisme pelaporan, perlindungan korban, dan prosedur banding. Kebijakan harus membedakan satire, seni, penggunaan berizin, dan penipuan berbahaya.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintesis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala penyebaran. Dalam konteks 19. tata kelola platform dan akuntabilitas algoritma, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema 19. tata kelola platform dan akuntabilitas algoritma menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai

dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber tepercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks 19. tata kelola platform dan akuntabilitas algoritma, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema 19. tata kelola platform dan akuntabilitas algoritma menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks 19. tata kelola platform dan akuntabilitas algoritma, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan 19. tata kelola platform dan akuntabilitas algoritma. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari

penghapusan konten, tetapi juga dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu, pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran “cari sendiri di internet”.

20. Hukum, Hak Asasi, dan Kebebasan Berekspresi

Regulasi deepfake menghadapi ketegangan antara perlindungan masyarakat dan kebebasan berekspresi. Larangan yang terlalu luas dapat menekan satire, kritik, penelitian, dan kreativitas. Sebaliknya, aturan yang terlalu sempit meninggalkan korban tanpa perlindungan. Pendekatan berbasis dampak dapat menilai niat, persetujuan, konteks, tingkat bahaya, target, serta apakah konten diberi label yang jelas.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintesis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala penyebaran. Dalam konteks 20. hukum, hak asasi, dan kebebasan berekspresi, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema 20. hukum, hak asasi, dan kebebasan berekspresi menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber tepercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks 20. hukum, hak asasi, dan kebebasan berekspresi, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme

koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema 20. hukum, hak asasi, dan kebebasan berekspresi menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks 20. hukum, hak asasi, dan kebebasan berekspresi, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan 20. hukum, hak asasi, dan kebebasan berekspresi. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penghapusan konten, tetapi juga dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu, pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran “cari sendiri di internet”.

21. Perkembangan Tata Kelola AI di Indonesia

Indonesia telah memiliki Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang menekankan inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, transparansi, dan tanggung jawab. Pada 2026, pemerintah menyelesaikan pembahasan lintas kementerian atas rancangan Peraturan Presiden tentang Etika Kecerdasan Artifisial dan peta jalan AI nasional 2026–2029. Perkembangan tersebut menunjukkan pergeseran dari pedoman sukarela menuju kerangka yang lebih formal, meskipun efektivitasnya akan bergantung pada definisi, pembagian kewenangan, kapasitas pengawasan, dan mekanisme penegakan.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintetis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala penyebaran. Dalam konteks 21. perkembangan tata kelola ai di indonesia, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema 21. perkembangan tata kelola ai di indonesia menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber tepercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks 21. perkembangan tata kelola ai di indonesia, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema 21. perkembangan tata kelola ai di indonesia menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan

pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks 21. perkembangan tata kelola ai di Indonesia, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan 21. perkembangan tata kelola ai di Indonesia. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penghapusan konten, tetapi juga dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu, pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran “cari sendiri di internet”.

22. Pendekatan Whole-of-Society untuk Integritas Informasi

Tidak ada satu lembaga yang dapat menyelesaikan disinformasi. Pemerintah memiliki kewenangan dan kapasitas koordinasi, tetapi juga dapat memiliki konflik kepentingan. Platform menguasai data dan distribusi, tetapi model bisnisnya mendorong keterlibatan. Media memiliki keterampilan verifikasi, tetapi menghadapi tekanan ekonomi. Akademisi menyediakan riset, sedangkan masyarakat sipil dekat dengan komunitas. Pendekatan whole-of-society menggabungkan peran tersebut dengan pembagian tanggung jawab yang jelas.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintetis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala penyebaran. Dalam konteks 22. pendekatan whole-of-society untuk integritas informasi, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema 22. pendekatan whole-of-society untuk integritas informasi menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber tepercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks 22. pendekatan whole-of-society untuk integritas informasi, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema 22. pendekatan whole-of-society untuk integritas informasi menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks 22. pendekatan whole-of-society untuk integritas informasi, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran

digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan 22. pendekatan whole-of-society untuk integritas informasi. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penghapusan konten, tetapi juga dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu, pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran “cari sendiri di internet”.

23. Membangun Kembali Kepercayaan Publik

Kepercayaan tidak dapat dipulihkan hanya dengan teknologi deteksi. Institusi perlu menunjukkan kompetensi, integritas, keterbukaan, keadilan prosedural, dan kepedulian terhadap masyarakat. Koreksi harus cepat, tetapi juga jujur mengenai keterbatasan. Pemimpin sebaiknya menghindari penggunaan istilah “hoaks” untuk membungkam kritik yang sah. Kepercayaan tumbuh ketika publik melihat bahwa kesalahan diakui, bukti tersedia, dan keputusan dapat diperiksa.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintesis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala penyebaran. Dalam konteks 23. membangun kembali kepercayaan publik, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital.

Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema 23. membangun kembali kepercayaan publik menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber tepercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks 23. membangun kembali kepercayaan publik, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema 23. membangun kembali kepercayaan publik menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks 23. membangun kembali kepercayaan publik, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan 23. membangun kembali kepercayaan publik. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan

yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penghapusan konten, tetapi juga dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu, pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran “cari sendiri di internet”.

24. Kerangka Manajemen Risiko Deepfake bagi Organisasi

Organisasi memerlukan proses yang sistematis: mengidentifikasi tokoh dan proses yang dapat ditiru, memetakan saluran komunikasi kritis, menetapkan verifikasi berlapis, melatih karyawan, mengembangkan pemantauan, menyusun protokol eskalasi, dan melakukan simulasi insiden. Setiap kejadian harus didokumentasikan untuk pembelajaran. Fokusnya bukan mencapai keamanan absolut, melainkan mengurangi peluang, mempercepat deteksi, membatasi dampak, dan memulihkan kepercayaan.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintetis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala penyebaran. Dalam konteks 24. kerangka manajemen risiko deepfake bagi organisasi, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema 24. kerangka manajemen risiko deepfake bagi organisasi menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat

dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber tepercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks 24. kerangka manajemen risiko deepfake bagi organisasi, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema 24. kerangka manajemen risiko deepfake bagi organisasi menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks 24. kerangka manajemen risiko deepfake bagi organisasi, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan 24. kerangka manajemen risiko deepfake bagi organisasi. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari

penghapusan konten, tetapi juga dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu, pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran “cari sendiri di internet”.

25. Agenda Kebijakan dan Peta Jalan Indonesia 2026–2035

Peta jalan nasional perlu menggabungkan perlindungan korban, integritas pemilu, keamanan siber, literasi publik, tata kelola platform, standar provenance, dukungan riset, dan kerja sama internasional. Tahap awal dapat memprioritaskan definisi hukum, kanal pengaduan, dan protokol komunikasi publik. Tahap menengah membangun laboratorium forensik, mekanisme audit, dan pendidikan nasional. Tahap panjang menanamkan integritas informasi sebagai bagian dari ketahanan demokrasi dan kapasitas negara digital.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintetis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala penyebaran. Dalam konteks 25. agenda kebijakan dan peta jalan indonesia 2026–2035, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema 25. agenda kebijakan dan peta jalan indonesia 2026–2035 menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber tepercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks 25. agenda kebijakan dan peta jalan indonesia 2026–2035, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak

dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema 25. agenda kebijakan dan peta jalan Indonesia 2026–2035 menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks 25. agenda kebijakan dan peta jalan Indonesia 2026–2035, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan 25. agenda kebijakan dan peta jalan Indonesia 2026–2035. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penghapusan konten, tetapi juga dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu,

pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran “cari sendiri di internet”.

Penutup: Menjaga Kepercayaan di Tengah Media Sintetis

Deepfake bukan alasan untuk menyerah pada relativisme bahwa tidak ada lagi kebenaran yang dapat diketahui. Justru karena bukti dapat dimanipulasi, masyarakat memerlukan prosedur verifikasi, lembaga terpercaya, standar teknis, pendidikan kritis, dan etika komunikasi yang lebih kuat. Tujuannya bukan membangun masyarakat yang percaya pada semua hal, juga bukan masyarakat yang mencurigai semua hal, melainkan masyarakat yang mampu memberikan kepercayaan secara proporsional berdasarkan bukti, proses, dan akuntabilitas.

Dimensi konseptual. Fenomena ini perlu dibedakan antara teknologi, konten, aktor, tujuan, saluran distribusi, dan dampaknya. Tanpa pembedaan tersebut, semua media sintetis mudah dianggap berbahaya, padahal risiko sangat bergantung pada konteks penggunaan, persetujuan, niat, dan skala penyebaran. Dalam konteks penutup: menjaga kepercayaan di tengah media sintetis, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi manajerial. Bagi organisasi, persoalan utamanya adalah penetapan tanggung jawab. Unit teknologi, komunikasi, hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan pimpinan tidak boleh bekerja terpisah. Protokol harus menentukan siapa memverifikasi, siapa memutuskan respons, dan siapa berkomunikasi kepada publik. Penerapan pada tema penutup: menjaga kepercayaan di tengah media sintetis menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi sosial. Dampak disinformasi tidak tersebar secara merata. Kelompok yang memiliki literasi lebih rendah, akses terbatas pada sumber terpercaya, atau pengalaman diskriminasi dapat menghadapi risiko berbeda. Kebijakan harus menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Dalam konteks penutup: menjaga kepercayaan di tengah media sintetis, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Kapasitas lokal, keragaman bahasa, dan karakter hubungan sosial Indonesia perlu menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi etika. Penilaian etis perlu mempertimbangkan martabat manusia, persetujuan, privasi, keadilan, keamanan, kebebasan berekspresi, serta hak untuk memperoleh pemulihan. Efisiensi teknis tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak pihak yang terdampak. Penerapan pada tema penutup:

menjaga kepercayaan di tengah media sintetis menuntut keseimbangan antara pencegahan risiko, perlindungan hak, dan pemeliharaan ruang publik yang terbuka. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Pendekatan reaktif yang baru bergerak setelah konten menjadi viral akan selalu tertinggal dari kecepatan distribusi digital. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Dimensi kebijakan. Kebijakan publik sebaiknya berorientasi pada integritas ekosistem informasi, bukan sekadar menghapus konten satu per satu. Transparansi sumber, akuntabilitas distribusi, ketahanan sosial, dan kapasitas institusi merupakan komponen yang saling melengkapi. Dalam konteks penutup: menjaga kepercayaan di tengah media sintetis, analisis ini memperlihatkan bahwa keluaran digital tidak dapat dipisahkan dari aktor yang merancang, mendistribusikan, dan memanfaatkannya. Keputusan yang baik harus didasarkan pada penilaian risiko yang dapat dijelaskan, bukti yang dapat diperiksa, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan. Intervensi juga perlu dinilai dampak sampingnya agar tidak mengubah kewaspadaan yang sehat menjadi sinisme umum terhadap semua sumber. Dengan demikian, solusi harus dipandang sebagai sistem berlapis yang menggabungkan manusia, teknologi, prosedur, dan institusi.

Ilustrasi kasus. Bayangkan sebuah kejadian yang berkaitan dengan penutup: menjaga kepercayaan di tengah media sintetis. Sebuah video berdurasi pendek beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Video tersebut tampak menunjukkan seorang pejabat atau pimpinan organisasi menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Dalam dua jam pertama, konten dibagikan ribuan kali, dipotong menjadi versi lebih pendek, dan diberi judul yang semakin provokatif. Sebagian pengguna mempercayainya karena sesuai dengan dugaan mereka; sebagian lain menolak semua klarifikasi sebagai bagian dari konspirasi. Organisasi yang menjadi sasaran awalnya lambat merespons karena belum memiliki prosedur verifikasi. Setelah tim teknis, komunikasi, hukum, dan pimpinan bertemu, organisasi mengeluarkan rekaman autentik, menjelaskan indikator manipulasi, menghubungi platform, dan meminta media tepercaya membantu klarifikasi. Meskipun penyebaran dapat dikurangi, jejak kecurigaan tetap bertahan. Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penghapusan konten, tetapi juga dari kecepatan koordinasi, konsistensi pesan, perlindungan korban, dan kemampuan memulihkan kepercayaan.

Temuan penelitian memberikan catatan penting. Kajian eksperimental menunjukkan bahwa label pemeriksa fakta dapat mengurangi kepercayaan dan kecenderungan membagikan informasi palsu, termasuk pada orang yang kurang percaya kepada pemeriksa fakta. Namun intervensi yang sangat menonjol juga dapat meningkatkan skeptisisme yang lebih umum. Penelitian lain memperingatkan bahwa pencarian daring yang dilakukan untuk memeriksa klaim justru dapat meningkatkan kepercayaan pada informasi palsu apabila hasil pencarian didominasi sumber berkualitas rendah. Karena itu, pendidikan publik perlu mengajarkan pencarian lateral dan evaluasi kualitas sumber, bukan hanya anjuran “cari sendiri di internet”.

Kerangka Manajemen Risiko Deepfake

Tahap	Pertanyaan Kunci	Risiko	Tindakan Utama
Identifikasi	Siapa dan proses apa yang paling mungkin ditiru?	Penipuan, reputasi, kebocoran	Pemetaan tokoh, kanal, dan aset kritis
Pencegahan	Bagaimana komunikasi autentik dibuktikan?	Spoofing dan rekayasa sosial	MFA, kode verifikasi, prosedur callback
Deteksi	Bagaimana anomali dikenali?	Keterlambatan respons	Pemantauan, forensik, laporan internal
Verifikasi	Siapa berwenang memastikan keaslian?	Keputusan salah dan kepanikan	Tim lintas fungsi, sumber primer, provenance
Respons	Apa pesan dan kanal resmi?	Kebingungan dan eskalasi	Satu juru bicara, klarifikasi bertahap
Pemulihan	Bagaimana korban dan kepercayaan dipulihkan?	Kerusakan jangka panjang	Bantuan korban, koreksi, transparansi
Pembelajaran	Apa yang harus diubah setelah insiden?	Pengulangan kesalahan	Post-incident review dan latihan berkala

Dua Belas Pertanyaan Evaluatif sebelum Merespons Konten yang Diduga Deepfake

1. Apakah sumber pertama konten dapat diidentifikasi?
2. Apakah file asli tersedia atau hanya versi yang telah dikompresi?
3. Apakah terdapat bukti independen yang mengonfirmasi peristiwa?
4. Apakah akun penyebar memiliki riwayat kredibel?
5. Apakah konteks waktu dan lokasi konsisten?
6. Apakah pihak yang ditampilkan telah dihubungi melalui kanal terverifikasi?
7. Apakah analisis teknis dilakukan oleh pihak kompeten?
8. Apakah terdapat metadata atau provenance yang dapat diperiksa?
9. Apakah respons publik akan memperbesar jangkauan konten?
10. Siapa kelompok yang paling mungkin dirugikan?
11. Apakah koordinasi dengan platform, media, dan aparat diperlukan?
12. Bagaimana organisasi akan mengoreksi informasi tanpa memperluas sinisme?

Glossarium

Deepfake: Media sintetis atau hasil manipulasi berbasis AI yang menampilkan seseorang seolah-olah mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak terjadi.

Misinformasi: Informasi salah yang disebarkan tanpa niat menipu.

Disinformasi: Informasi salah atau menyesatkan yang dibuat dan disebarkan dengan sengaja.

Malinformasi: Informasi yang pada dasarnya benar tetapi digunakan di luar konteks atau untuk mencelakakan.

Media sintetis: Gambar, audio, video, atau teks yang dihasilkan atau diubah secara signifikan oleh sistem komputasional.

Kloning suara: Teknik menghasilkan suara sintetis yang meniru karakteristik suara seseorang.

Liar's dividend: Keuntungan yang diperoleh pelaku ketika dapat menolak bukti autentik dengan menuduhnya sebagai deepfake.

Provenance: Informasi mengenai asal-usul, proses pembuatan, dan riwayat perubahan suatu konten.

Watermarking: Penyisipan tanda yang dapat menunjukkan asal atau status konten, termasuk bahwa konten dibuat oleh AI.

Fact-checking: Proses memeriksa klaim dengan bukti dan sumber yang dapat diverifikasi.

Prebunking: Intervensi preventif yang menjelaskan teknik manipulasi sebelum seseorang terpapar disinformasi.

Debunking: Koreksi setelah informasi salah beredar.

Integritas informasi: Kondisi ketika ekosistem informasi mendukung ketersediaan, akses, dan pertukaran informasi yang akurat, plural, dan dapat dipercaya.

Krisis epistemik: Kondisi ketika masyarakat kehilangan dasar bersama untuk menentukan apa yang dapat dianggap benar atau dapat diketahui.

Autentikasi: Proses memastikan identitas pengirim atau keaslian sumber dan konten.

Forensik digital: Pemeriksaan teknis terhadap perangkat dan file digital untuk menilai asal, perubahan, dan keasliannya.

Bias konfirmasi: Kecenderungan mencari dan menerima informasi yang mendukung keyakinan awal.

Efek kebenaran ilusi: Kecenderungan menganggap informasi lebih benar setelah terpapar berulang kali.

Penalaran termotivasi: Proses menilai bukti dengan cara yang mendukung identitas, kepentingan, atau kesimpulan yang diinginkan.

Whole-of-society approach: Pendekatan yang melibatkan pemerintah, platform, media, akademisi, bisnis, dan masyarakat sipil secara terkoordinasi.

Daftar Pustaka

- Aslett, K., Sanderson, Z., Godel, W., Persily, N., Nagler, J., Bonneau, R., & Tucker, J. A. (2024). Online searches to evaluate misinformation can increase its perceived veracity. *Nature*, 625, 548–556. <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06883-y>
- Budak, C., Nyhan, B., Rothschild, D. M., Thorson, E., & Watts, D. J. (2024). Misunderstanding the harms of online misinformation. *Nature*, 630, 45–53. <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07417-w>
- Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). Deep fakes: A looming challenge for privacy, democracy, and national security. *California Law Review*, 107(6), 1753–1820. <https://doi.org/10.15779/Z38RV0D15I>
- Clark, S., & Lewandowsky, S. (2026). The continued influence of AI-generated deepfake videos despite transparency warnings. *Communications Psychology*, 4, 13. <https://doi.org/10.1038/s44271-025-00381-9>
- Feuerriegel, S., DiResta, R., Goldstein, J. A., Kumar, S., Lorenz-Spreen, P., Tomz, M., & Pröllochs, N. (2023). Research can help to tackle AI-generated disinformation. *Nature Human Behaviour*, 7, 1818–1821. <https://doi.org/10.1038/s41562-023-01726-2>
- Farid, H. (2022). Creating, using, misusing, and detecting deep fakes. *Journal of Online Trust and Safety*, 1(4). <https://doi.org/10.54501/jots.v1i4.56>
- Hoes, E., Aitken, B., Zhang, J., Gackowski, T., & Wojcieszak, M. (2024). Prominent misinformation interventions reduce misperceptions but increase scepticism. *Nature Human Behaviour*, 8, 1545–1553. <https://doi.org/10.1038/s41562-024-01884-x>
- Leshner, M., Pawelec, H., & Desai, A. (2022). Disentangling untruths online: Creators, spreaders and how to stop them. *OECD Going Digital Toolkit Notes*, No. 23. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/84b62df1-en>
- Martel, C., & Rand, D. G. (2024). Fact-checker warning labels are effective even for those who distrust fact-checkers. *Nature Human Behaviour*, 8, 1957–1967. <https://doi.org/10.1038/s41562-024-01973-x>
- OECD. (2022). Building trust and reinforcing democracy: Preparing the ground for government action. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/76972a4a-en>
- OECD. (2024). Facts not fakes: Tackling disinformation, strengthening information integrity. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/d909ff7a-en>
- Silalahi, W., Natassya, M., & Evelina, S. (2024). Penggunaan deepfake terkait penyebaran isu hoaks pada masa kampanye Pemilu 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 6(1). <https://doi.org/10.55108/jbk.v6i01.441>
- Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). Deepfakes and disinformation: Exploring the impact of synthetic political video on deception, uncertainty, and trust in news. *Social Media + Society*, 6(1). <https://doi.org/10.1177/2056305120903408>
- Westerlund, M. (2019). The emergence of deepfake technology: A review. *Technology Innovation Management Review*, 9(11), 39–52. <https://doi.org/10.22215/timreview/1282>

- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. Council of Europe. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27688.26889>
- Kietzmann, J., Lee, L. W., McCarthy, I. P., & Kietzmann, T. C. (2020). Deepfakes: Trick or treat? Business Horizons, 63(2), 135–146. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.11.006>
- Langguth, J., Pogorelov, K., Brenner, S., Filkuková, P., & Schroeder, D. T. (2021). Don't trust your eyes: Image manipulation in the age of deepfakes. Frontiers in Communication, 6, 632317. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2021.632317>
- Rini, R. (2020). Deepfakes and the epistemic backstop. Philosophers' Imprint, 20(24), 1–16. <https://doi.org/10.3998/phimp.3521354.0020.024>
- Tandoc, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining “fake news”: A typology of scholarly definitions. Digital Journalism, 6(2), 137–153. <https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1360143>
- Verdoliva, L. (2020). Media forensics and deepfakes: An overview. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 14(5), 910–932. <https://doi.org/10.1109/JSTSP.2020.3002101>